



KONSOLIDASI INTELEKTUAL ISLAM DI INDONESIA ABAD KE-19: JARINGAN HARAMAIN, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN TRANSFORMASI SOSIAL-KEAGAMAAN

Ernawati¹, Muhammad Mutawali², Ismail³, Tety Muhithoh⁴

Universitas Esa Unggul¹, UIN Mataram², Universitas Muhammadiyah Jakarta³

Email Corresponding Author: ernawati@esaunggul.ac.id

Article History	Submite	Accepted	Publish
	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun
	22/06/2026	25/06/2026	29/06/2026

Abstract English

The nineteenth century was a pivotal period in the history of Islam in Indonesia, as it witnessed a process of socio-religious and intellectual consolidation that significantly influenced the development of Islam in the early twentieth century. This study aims to analyze how the intellectual growth of Islam in nineteenth-century Indonesia was shaped by the strengthening of ulama authority, the institutionalization of traditional Islamic education, the Haramain networks, the culture of Islamic texts, and the pressures of Dutch colonialism. This study employs a qualitative approach based on library research by examining the literature on Islamic intellectual history, Islamic education, the scholarly networks of the Malay-Indonesian ulama, and textual culture in Southeast Asia. The findings demonstrate that the nineteenth century was not merely a phase of traditional religiosity, but rather a period of intellectual consolidation in which local ulama gained stronger legitimacy through transregional scholarly networks, while pesantren, surau, and dayah developed as infrastructures for the reproduction of knowledge, and print culture expanded the circulation of Islamic religious texts. At the same time, colonialism further reinforced the position of Islamic educational institutions as bastions of socio-religious identity and authority. This study argues that the interaction between global Islamic networks, local institutional dynamics, and changes in the medium of knowledge transmission is essential for understanding the formation of the foundations of modern Indonesian Islam.

Key Word: *Islamic intellectual consolidation, Haramain, Islamic education, colonialism, textual culture*

أبستراك عربية

يُعدُّ القرنُ التاسع عشرَ مرحلةً مهمَّةً في تاريخ الإسلام في إندونيسيا؛ إذ شهد في هذه الفترة نوعاً من الترسُّخ الاجتماعي والديني والفكري الذي كان له أثرٌ كبيرٌ في تطوُّر الإسلام في مطلع القرن العشرين. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي تشكَّل بها النموُّ الفكري الإسلامي في إندونيسيا خلال القرن التاسع عشر من خلال تعزيز سلطة العلماء، وترسيخ مؤسسات التعليم الإسلامي التقليدي، وشبكات الحرمين الشريفين، وثقافة الكتاب، فضلاً عن ضغوط الاستعمار الهولندي. وتعتمد هذه الدراسة المنهج الكيفي القائم على الدراسة المكتبية، من خلال فحص الأدبيات المتعلقة بالتاريخ الفكري الإسلامي، والتعليم الإسلامي، وشبكات علماء الأرخبيل الإندونيسي، وثقافة النصوص في جنوب شرق آسيا. وتُظهر نتائج الدراسة أنَّ القرن التاسع عشر لم يكن مجرد مرحلة من التدبُّن التقليدي، بل كان فترة ترسُّخ فكري، اكتسب فيها العلماء المحليون شرعيةً أقوى عبر الشبكات العلمية العابرة للأقاليم، كما تطوَّرت مؤسسات التعليم الديني مثل (المدارس الداخلية الإسلامية والزوايا والمعاهد) بوصفها بنى تحتية لإعادة إنتاج المعرفة، وأسهمت ثقافة الطباعة في توسيع تداول الكتب الدينية. ومن جهةٍ أخرى، أسهم الاستعمار في إبراز مكانة مؤسسات التعليم الإسلامي بوصفها حصناً للهوية والسلطة الاجتماعية والدينية. وتجادل هذه الدراسة بأنَّ التفاعل بين الشبكات الإسلامية العالمية، والديناميكيات المؤسسية المحلية، والتحوُّل في وسائط نقل العلم، يمثِّل مفتاحاً أساسياً لفهم تشكُّل الأسس التي قام عليها الإسلام الإندونيسي الحديث.

Abstrak Indonesia

Abad ke-19 merupakan periode penting dalam sejarah Islam di Indonesia karena pada masa ini terjadi konsolidasi sosial-keagamaan dan intelektual yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam pada awal abad ke-20. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia abad ke-19 dibentuk oleh penguatan otoritas ulama, pelembagaan pendidikan Islam tradisional, jaringan Haramain, budaya kitab, serta tekanan kolonialisme Belanda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah literatur sejarah intelektual Islam, pendidikan Islam, jaringan ulama Nusantara, dan budaya teks di Asia Tenggara. Hasil kajian menunjukkan bahwa abad ke-19 bukan hanya fase keberagaman tradisional, tetapi periode konsolidasi intelektual ketika ulama lokal memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui jaringan keilmuan transregional, pesantren-surau-dayah berkembang sebagai infrastruktur reproduksi pengetahuan, dan budaya cetak memperluas sirkulasi kitab keagamaan. Di sisi lain, kolonialisme justru mempertegas posisi lembaga pendidikan Islam sebagai benteng identitas dan otoritas sosial-keagamaan. Penelitian ini berargumen bahwa interaksi antara jaringan global Islam, dinamika lokal kelembagaan, dan perubahan medium transmisi ilmu merupakan kunci untuk memahami pembentukan fondasi Islam Indonesia modern.

Kata kunci: *konsolidasi intelektual Islam, Haramain, pendidikan Islam, kolonialisme, budaya kitab*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Abad ke-19 merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa ini, masyarakat Nusantara mengalami berbagai perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan sosial dan keagamaannya. Perubahan tersebut tidak hanya muncul dari dinamika internal umat Islam sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama semakin kuatnya intervensi kolonial Belanda dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kehidupan keagamaan umat Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang pada masa itu.

Secara sosial, masyarakat Indonesia abad ke-19 berada dalam struktur yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, ikatan kekerabatan, patronase elite tradisional, serta stratifikasi sosial yang cukup kuat. Dalam situasi demikian, agama Islam memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber nilai, pedoman moral, sekaligus kekuatan sosial yang mampu mempersatukan masyarakat. Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran ibadah ritual, tetapi juga hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari, dalam hubungan sosial, pendidikan, hukum keluarga, hingga dalam bentuk resistensi terhadap kekuasaan kolonial.

Dalam kehidupan keagamaan, abad ke-19 menunjukkan berkembangnya lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, surau, dan langgar yang menjadi pusat pembelajaran agama serta pembentukan kesadaran keislaman masyarakat. Ulama menempati posisi penting sebagai pemimpin spiritual, pendidik, sekaligus tokoh sosial yang memiliki pengaruh luas. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menjadi penjaga tradisi intelektual Islam di tengah perubahan sosial yang terjadi. Dari lembaga dan jaringan ulama inilah muncul reproduksi pengetahuan Islam yang terus berkembang dan membentuk corak keberagaman masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, abad ke-19 juga ditandai oleh meningkatnya hubungan antara umat Islam di Nusantara dengan dunia Islam yang lebih luas, khususnya Timur Tengah. Mobilitas jamaah haji, pelajar, dan ulama ke Makkah menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat jaringan intelektual Islam. Melalui jaringan tersebut, gagasan-gagasan keagamaan, pembaruan pemikiran, dan semangat solidaritas umat Islam mulai berkembang di Indonesia. Akibatnya, kehidupan keagamaan masyarakat tidak lagi semata-mata bersifat lokal, tetapi mulai terhubung dengan arus pemikiran Islam global.

Namun demikian, kondisi sosial keagamaan abad ke-19 juga memperlihatkan adanya ketegangan antara tradisi lokal, praktik keagamaan masyarakat, dan semangat purifikasi ajaran Islam. Di berbagai wilayah, Islam berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya setempat, sehingga melahirkan corak keberagaman yang khas. Sementara itu, sebagian ulama dan kelompok pembaru mulai mendorong pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Ketegangan ini menjadi salah satu ciri penting dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim Indonesia pada masa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kondisi sosial keagamaan abad ke-19 di Indonesia menjadi penting untuk memahami latar historis perkembangan intelektual Islam di Indonesia. Kondisi sosial keagamaan pada masa ini bukan hanya menjadi cerminan kehidupan umat Islam di masa lampau, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi lahirnya gerakan keagamaan, lembaga pendidikan Islam, serta perkembangan pemikiran Islam di Indonesia pada periode-periode berikutnya.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan argumen bahwa perkembangan Islam Indonesia abad ke-19 perlu dibaca sebagai proses konsolidasi intelektual yang dibentuk oleh tiga poros utama: jaringan keilmuan transregional, pelebagaan pendidikan Islam, dan transformasi sosial-keagamaan di bawah kolonialisme. Rumusan masalah artikel ini adalah: bagaimana konsolidasi intelektual Islam di Indonesia abad ke-19 terbentuk melalui interaksi antara jaringan Haramain, lembaga pendidikan Islam, budaya teks, dan tekanan kolonial? Artikel ini bertujuan menjelaskan proses tersebut dengan memadukan analisis tentang pertumbuhan intelektual Islam, akar lembaga pendidikan, jaringan haji dan Haramain, pengaruh kolonialisme Belanda, serta budaya kitab dan percetakan Islam. Secara akademik, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian sejarah intelektual Islam di Indonesia dengan menegaskan bahwa fondasi Islam Indonesia modern bertumpu pada interaksi dinamis antara tradisi lokal, jaringan global, dan struktur kolonial (Burhanudin, 2022; Cahyadi et al., 2025; Firdaus & Imawan, 2024).

KAJIAN TEORI

Artikel ini bertolak dari perspektif Sejarah intelektual Islam yang memandang perkembangan Islam bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai proses pembentukan pengetahuan, otoritas, dan transmisi ilmu dalam konteks sosial tertentu. Dalam kerangka ini, Islam Indonesia abad ke-19 dipahami sebagai fase konsolidasi intelektual, yakni periode ketika ulama, lembaga pendidikan, jaringan keilmuan, dan budaya teks saling berinteraksi membentuk fondasi Islam Indonesia modern (Fogg, 2019).

Konsep kedua adalah Islam transregional, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia tidak berlangsung secara lokal-tertutup, melainkan terhubung erat dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Haramain. Mobilitas haji, studi, pertukaran kitab,

dan transmisi sanad memperlihatkan bahwa hubungan Nusantara dengan Makkah dan Madinah menjadi jalur penting bagi masuknya gagasan, metode belajar, dan legitimasi keilmuan baru (Azra, 2021). Dengan demikian, jaringan Haramain dapat dipahami sebagai medium pembentukan otoritas ulama dan perluasan horizon intelektual Islam Nusantara.

Selanjutnya, teori otoritas ulama menjelaskan bahwa posisi ulama abad ke-19 tidak hanya ditentukan oleh fungsi ritual, tetapi juga oleh jaringan ilmu, sanad, kapasitas mengajar, dan kemampuan menulis kitab. Otoritas tersebut direproduksi melalui mekanisme sorogan, bandongan, halaqah, dan relasi guru-murid yang membentuk legitimasi intelektual secara berkelanjutan (Cahyadi et al., 2025). Karena itu, ulama dipahami bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi pengetahuan Islam.

Kajian ini juga menggunakan konsep pelembagaan pendidikan Islam tradisional untuk menjelaskan pertumbuhan pesantren, surau, dan dayah sebagai infrastruktur utama transmisi ilmu. Lembaga-lembaga ini tumbuh dari kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat Muslim, bukan dari proyek pendidikan formal negara. Dalam hal ini, pendidikan Islam tradisional berfungsi sebagai ruang pembelajaran agama, pembentukan etika, dan reproduksi identitas sosial-keagamaan (Adona et al., 2025).

Di samping itu, konsep kolonialisme dan kontrol pengetahuan digunakan untuk membaca bagaimana kekuasaan kolonial Belanda ikut membentuk medan sosial-keagamaan Islam. Pengetahuan kolonial tentang Islam dipakai untuk pemetaan, pengawasan, dan pengendalian umat Islam, sehingga pesantren dan jaringan ulama justru semakin penting sebagai benteng identitas dan solidaritas sosial (Asrori & Ismail, 2023; Burhanudin, 2014).

Terakhir, konsep budaya kitab dan percetakan menjelaskan dimensi material dari konsolidasi intelektual Islam. Tradisi manuskrip, kitab Jawi, kitab kuning, dan kemudian teknologi cetak memperluas distribusi ilmu serta membantu pembakuan materi ajar di lembaga pendidikan Islam. Oleh sebab itu, pertumbuhan intelektual Islam abad ke-19 perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara jaringan global, otoritas ulama, institusi pendidikan, kolonialisme, dan medium teks (Burhanudin, 2022; Lim, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka dipilih karena objek kajian berupa gagasan, jaringan keilmuan, lembaga pendidikan, dan dinamika sosial-keagamaan Islam abad ke-19 yang terutama terekam dalam karya ilmiah, buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah. Dengan metode ini memungkinkan penulis menelaah secara sistematis perkembangan intelektual Islam Indonesia melalui pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu buku dan artikel ilmiah yang membahas sejarah intelektual Islam di Indonesia, jaringan Haramain, pesantren, surau, dayah, kolonialisme Belanda, dan budaya kitab serta percetakan Islam. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian, otoritas akademiknya, dan kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan intelektual Islam, lembaga pendidikan, dan transformasi sosial-keagamaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan literatur. Literatur yang terkumpul kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema pokok, yaitu:

pertumbuhan intelektual Islam, akar lembaga pendidikan Islam, jaringan haji dan Haramain, pengaruh kolonialisme, serta budaya kitab dan percetakan. Tahap ini dilakukan agar pembahasan tidak sekadar kompilatif, tetapi tersusun secara analitis dan terarah.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan pendekatan historis-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumen, dan pola hubungan antartema dalam literatur yang dikaji. Sementara itu, pendekatan historis-interpretatif digunakan untuk membaca teks dalam konteks sosial dan politik abad ke-19, sehingga perubahan sosial-keagamaan Islam di Indonesia tidak dipahami secara lepas dari konteks kolonial, jaringan ulama, dan transformasi media pengetahuan.

Melalui metode ini, artikel bertujuan menghasilkan pembacaan sintesis mengenai abad ke-19 sebagai fase konsolidasi intelektual Islam di Indonesia. Dengan demikian, studi pustaka tidak hanya berfungsi menghimpun pendapat para sarjana, tetapi juga menempatkan berbagai temuan tersebut ke dalam satu kerangka analitis yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Keagamaan Abad ke-19 di Indonesia dan Fase Pertumbuhan Intelektual Islam

Abad ke-19 merupakan masa yang sangat menentukan dalam sejarah sosial keagamaan Islam di Indonesia. Pada periode ini, masyarakat Muslim di berbagai wilayah Nusantara hidup di tengah tekanan kolonial yang semakin kuat, terutama setelah ekspansi kekuasaan Belanda pada abad ke-19. Dalam situasi tersebut, Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan ritual, tetapi juga menjadi sumber legitimasi moral, identitas sosial, dan daya tahan kolektif masyarakat. Di tingkat lokal, tokoh-tokoh agama dengan sebutan yang berbeda-beda seperti kyai, syekh, teungku, atau tuan guru menjadi pusat kehidupan desa: mereka mengajar, memimpin ibadah, memberi nasihat, bahkan dalam banyak kasus menjadi rujukan sosial dan simbol perlawanan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, surau, dan meunasah juga semakin mapan pada abad ini, sehingga membentuk fondasi penting bagi lahirnya tradisi intelektual Islam yang lebih terstruktur (Fogg, 2019).

Dalam konteks sosial keagamaan itu, kehidupan Islam abad ke-19 tidak dapat dipahami semata sebagai kelanjutan tradisi lama. Justru pada masa inilah terjadi proses intensifikasi otoritas keagamaan. Seorang ulama tidak lagi dipandang hanya karena kapasitas ritualnya, tetapi juga karena jaringan ilmunya, pengalaman hajinya, dan kedalamannya dalam menguasai kitab-kitab klasik. Dengan kata lain, status sosial ulama semakin terkait dengan mobilitas intelektual. Mereka yang pernah belajar di Makkah atau berhubungan dengan pusat-pusat ilmu Islam memperoleh otoritas yang lebih luas di mata masyarakat. Karena itu, fase ini penting dibaca sebagai tahap peralihan dari keberagamaan lokal yang terutama bersandar pada tradisi turun-temurun menuju keberagamaan yang lebih sadar teks, sanad, dan jaringan keilmuan (Asrori & Ismail, 2023).

Fase pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia pada abad ke-19 pada dasarnya ditandai oleh meluasnya jaringan transregional antara Nusantara dan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, terutama Haramain. Azyumardi Azra mencatat bahwa pada penghujung abad ke-19 gelombang baru wacana Muslim transregional telah mencapai kepulauan Melayu-Indonesia, sementara Francis R. Bradley menunjukkan bahwa jaringan pengetahuan antara Makkah dan Asia Tenggara pada abad ke-19 tidak bersifat sporadis,

melainkan dibangun melalui komunitas, keluarga, manuskrip, dan sirkulasi teks yang intens. Artinya, pertumbuhan intelektual Islam pada masa ini lahir dari keterhubungan yang semakin rapat antara ruang lokal Nusantara dengan dunia Islam yang lebih luas (Azra, 2021).

Jalur haji memegang peranan sentral dalam proses tersebut. Pada akhir abad ke-19, banyak Muslim dari Indonesia tidak hanya berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah, tetapi juga tinggal lebih lama untuk belajar fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Dalam proses itu terbentuk komunitas Jawi di Haramain, yaitu komunitas pelajar dan ulama asal kepulauan Melayu-Indonesia yang menjadi simpul penting pertukaran ilmu. Dari komunitas inilah gagasan, kitab, metode pengajaran, dan jaringan sanad dibawa pulang ke Nusantara. Bradley bahkan menekankan bahwa ribuan manuskrip Melayu-Islam yang ia teliti memperlihatkan peran komunitas Asia Tenggara dalam membangun jaringan ilmu transoceanic pada abad ke-19. Dengan demikian, ibadah haji pada masa ini juga harus dibaca sebagai jalur produksi dan distribusi intelektual (Bradley, 2014).

Di tingkat kelembagaan, pertumbuhan intelektual Islam abad ke-19 bertumpu pada lembaga pendidikan tradisional. Pesantren, surau, dan lembaga sejenis menjadi tempat berlangsungnya transmisi ilmu melalui pembacaan kitab, pengajaran berulang, hafalan, serta relasi personal antara guru dan murid. Menurut Kevin W. Fogg, sekolah-sekolah Islam tradisional di berbagai wilayah Nusantara pada masa itu berorientasi pada pembelajaran bahasa Arab dan penguasaan teks-teks ilmu keislaman, terutama fikih, teologi, dan adab. Kajian mutakhir tentang sosiologi pengetahuan pesantren juga menunjukkan bahwa mekanisme seperti sorogan, bandongan, halaqah, dan sanad membentuk komunitas ilmu yang berkesinambungan; sekalipun penelitian ini berbicara dalam cakupan lebih panjang, temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa pesantren sejak abad ke-19 mampu menjadi institusi reproduksi otoritas intelektual Islam yang relatif stabil (Fogg, 2019).

Pertumbuhan intelektual itu semakin nyata melalui kemunculan ulama-ulama Nusantara yang mencapai posisi penting di Haramain. Kajian terbaru menempatkan abad ke-19 sebagai masa ketika, di tengah tekanan penjajahan di tanah air, ulama Nusantara justru mencapai puncak prestasi intelektual di Makkah dan Madinah. Tokoh seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Syekh Mahfudz at-Tarmasi, dan KH. Ahmad Rifa'i, menjadi contoh utama. Nawawi al-Bantani, misalnya, digambarkan memiliki posisi yang sangat penting dalam tradisi intelektual pesantren; karya-karyanya populer dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan diskursus Islam berbasis pesantren. Begitupula Arsyad al-Banjari, di Makkah mempelajari agama bersama dengan teman-temannya yang antara lain Abdussamad al-Palimbani, Abdul Wahab Bugis, dan Abdurrahman Misri al-Bathawi. Mereka juga dikenal dengan julukan Empat Serangkai dari Tanah Jawi (Melayu). Beliau memperoleh kesempatan mengajar di Masjidil Haram dan mengeluarkan fatwa. Sementara itu, Mahfudz at-Tarmasi dikenal sebagai ulama produktif yang mendidik banyak anggota komunitas Jawi di Makkah dan melalui murid-muridnya mentransmisikan ilmu kembali ke Nusantara. Begitupula Ahmad Rifa'i sepulangnya dari Makkah mendirikan Lembaga Pondok Pesantren, dalam waktu yang singkat banyak santri yang belajar kepadanya karena cara mengajarnya menggunakan gaya bahasa Jawa yang menarik dalam bentuk syair. Dengan demikian, fase pertumbuhan intelektual Islam abad ke-19 bukan hanya soal bertambahnya jumlah ulama, tetapi juga meningkatnya kapasitas produksi teks, pengajaran, dan jaringan transmisi ilmu (Asrori & Ismail, 2023).

Selain melalui jalur fikih dan pendidikan formal keagamaan, pertumbuhan intelektual Islam pada abad ke-19 juga berlangsung melalui jaringan tasawuf dan tarekat, seperti Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang didirikan oleh sufi dan syekh besar di Masjidil Haram yang bernama Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. Perkembangan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah menunjukkan bahwa transmisi ilmu tidak hanya berlangsung di ruang kelas pesantren, tetapi juga melalui disiplin spiritual, silsilah mursyid, dan pengorganisasian sosial keagamaan. Kajian terbaru mencatat bahwa tarekat ini didirikan oleh seorang syekh dari Indonesia yang menggabungkan ajaran Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, lalu memberi dampak nyata pada lingkungan sosial pengikutnya. Dalam konteks abad ke-19, hal ini penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia memiliki dimensi normatif-spiritual yang kuat; ia tidak semata lahir dari perdebatan teks, melainkan juga dari pembentukan habitus religius kolektif (Alifa et al., 2023).

Unsur lain yang sangat penting adalah perubahan dari budaya manuskrip menuju budaya cetak. Pada akhir abad ke-19, Singapura tampil sebagai pusat pencetakan dan distribusi teks-teks Muslim-Melayu litografis di kawasan Melayu-Indonesia. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa sejak akhir abad ke-19 buku-buku keagamaan mulai diproduksi massal di pusat-pusat cetak seperti Kairo, Bombay, Singapura, Surabaya, dan Bandung. Dampaknya besar: akses terhadap kitab menjadi lebih luas, harga buku lebih murah, dan materi pembelajaran pesantren cenderung menjadi lebih standar. Transformasi ini mempercepat sirkulasi ilmu dan memperluas jangkauan otoritas ulama, karena gagasan keagamaan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada manuskrip yang terbatas atau kehadiran fisik seorang guru (Lim, 2024).

Namun, pertumbuhan intelektual Islam abad ke-19 tidak berlangsung secara linear dan seragam. Di Jawa, misalnya, lanskap keagamaan pada masa itu sangat majemuk. Kajian Andrea Acri, Verena H. Meyer, dan Zakariya P. Aminullah menunjukkan bahwa religiusitas Jawa abad ke-19 bersifat multifaset dan multivokal, memuat unsur-unsur Sufi, tradisi Islam normatif, dan jejak tradisi pra-Islam. Mereka juga menegaskan bahwa abad ke-19 ditandai oleh ketegangan antara kelompok yang dilabeli “Javanist” atau “heterodox” dengan kelompok yang semakin menekankan kemurnian reformis. Ketegangan ini justru penting bagi sejarah intelektual Islam, karena dari sanalah terjadi penajaman argumen, penertiban otoritas, dan perdebatan mengenai batas-batas Islam yang sah (Asrori & Ismail, 2023).

Pada fase pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia pada abad ke-19 dapat dipahami sebagai periode konsolidasi besar-besaran dalam kehidupan keagamaan Muslim Nusantara. Konsolidasi itu berlangsung melalui lima jalur utama: penguatan otoritas ulama lokal, pelembagaan pendidikan Islam tradisional, perluasan jaringan Haramain dan komunitas Jawi, produktivitas karya ulama Nusantara, serta percepatan sirkulasi ilmu melalui budaya cetak. Semua proses tersebut menjadikan abad ke-19 bukan sekadar latar sosial bagi perkembangan Islam di Indonesia, melainkan fondasi historis bagi lahirnya modernisasi pemikiran Islam, gerakan pembaruan, dan organisasi-organisasi Islam pada awal abad ke-20 (Fogg, 2019).

Akar Pertumbuhan Lembaga Pendidikan di Indonesia Abad ke-19

Jika dilihat dari sudut sejarah intelektual Islam, pertumbuhan lembaga pendidikan di Indonesia pada abad ke-19 tidak lahir secara tiba-tiba melalui kebijakan formal negara,

melainkan tumbuh dari institusi sosial-keagamaan yang sudah hidup di tengah masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, akar pertumbuhan lembaga pendidikan terletak pada keberadaan ulama dan sekolah-sekolah keagamaan tradisional yang telah menjadi basis perubahan sosial-keagamaan jauh sebelum munculnya format pendidikan modern. Karena itu, abad ke-19 lebih tepat dipahami sebagai fase konsolidasi kelembagaan pendidikan Islam tradisional, yakni saat lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dan dayah semakin menemukan bentuk sosial, otoritas, dan fungsi intelektualnya di tengah masyarakat (Fogg, 2019).

Akar pertama pertumbuhan lembaga pendidikan itu adalah kebutuhan transmisi ilmu agama di tingkat lokal. Masyarakat Muslim memerlukan ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pengajaran Al-Qur'an, fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak. Karena itu, lembaga pendidikan Islam awal tumbuh secara organik dari kebutuhan komunitas. Di Jawa, pesantren berkembang sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pembinaan sosial yang bercorak indigenous. Di Minangkabau, surau menjadi salah satu institusi pendidikan Islam paling awal yang bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan moral, pembelajaran agama, dan latihan kepemimpinan sosial. Di Aceh, dayah tampil sebagai institusi pendidikan Islam yang mengakar kuat sejak masa kesultanan dan tetap berperan penting hingga masa pra-kemerdekaan. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan abad ke-19 sangat erat dengan kebutuhan masyarakat Muslim untuk menjaga kesinambungan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Taufiq & Suryo, 2024).

Akar kedua adalah otoritas ulama dan pola transmisi keilmuan. Lembaga pendidikan Islam abad ke-19 bertumbuh karena ia ditopang oleh figur ulama yang memiliki legitimasi keilmuan dan moral. Di pesantren, otoritas ini terwujud dalam hubungan kyai-santri dan dalam mekanisme pengajaran seperti bandongan, sorogan, halaqah, dan sanad. Struktur seperti ini menjadikan lembaga pendidikan bukan sekadar tempat belajar, melainkan juga ruang pembentukan habitus intelektual. Hal yang sama dapat dilihat di surau Minangkabau, yang dikelola melalui relasi langsung antara tuanku dan murid, dengan corak pendidikan komunal dan nonformal, tetapi tetap terstruktur secara kultural. Dengan demikian, pertumbuhan lembaga pendidikan pada abad ke-19 berakar pada kekuatan relasi pedagogis personal, bukan pada birokrasi sekolah modern. Di situlah sebabnya lembaga-lembaga ini mampu bertahan lama, karena dasar utamanya adalah kepercayaan sosial kepada ulama dan kesinambungan sanad keilmuan (Adona et al., 2025).

Akar ketiga adalah meluasnya jaringan ulama Nusantara dengan Haramain dan dunia Islam yang lebih luas. Pada abad ke-19, perjalanan haji dan studi ke Makkah-Madinah tidak hanya memperkuat religiositas, tetapi juga memperluas cakrawala intelektual ulama Nusantara. Jaringan transregional ini membuat lembaga pendidikan di Indonesia memperoleh pasokan gagasan, kitab, metode belajar, dan legitimasi sanad dari pusat-pusat keilmuan Islam. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-19 gelombang baru wacana Muslim transregional telah sampai ke kepulauan Melayu-Indonesia. Dalam konteks ini, ulama Nusantara abad ke-19 bukan hanya tokoh individu, melainkan simpul jaringan intelektual yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi belajar di pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Karya-karya mereka kemudian menjadi rujukan utama di berbagai pesantren dan membentuk karakter pembelajaran Islam tradisional di Nusantara (Darmawan et al., 2025).

Akar keempat adalah dinamika pembaruan internal dalam masyarakat Muslim sendiri. Pertumbuhan lembaga pendidikan abad ke-19 tidak hanya bersifat reproduktif, tetapi juga korektif. Di Minangkabau, misalnya, gerakan Paderi membawa dorongan purifikasi dan memperkenalkan orientasi keagamaan yang lebih berbasis syariat. Walaupun gerakan ini memunculkan konflik dengan kelompok adat dan tarekat, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ia juga berkontribusi pada modernisasi pendidikan Islam dan pada pergeseran orientasi keilmuan ulama Minangkabau. Dalam kerangka ini, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai ruang transmisi tradisi, tetapi juga sebagai arena perdebatan tentang bentuk Islam yang dianggap otoritatif. Artinya, akar pertumbuhan lembaga pendidikan pada abad ke-19 juga berasal dari pergumulan intelektual internal umat Islam, antara pelestarian tradisi, peneguhan syariat, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial (Adona et al., 2025).

Akar kelima adalah budaya teks: manuskrip, kitab, dan kemudian cetak. Pertumbuhan lembaga pendidikan Islam pada abad ke-19 sangat bergantung pada sirkulasi pengetahuan tertulis. Proses belajar di pesantren, surau, dan dayah bertumpu pada pembacaan, penyalinan, syarah, dan pengajaran kitab. Menjelang akhir abad ke-19, perubahan besar terjadi ketika Singapura tampil sebagai pusat pencetakan dan distribusi teks-teks Muslim-Melayu litografis di kawasan Melayu-Indonesia. Perkembangan ini penting karena memperluas akses terhadap bahan ajar, mempercepat penyebaran kitab, dan secara bertahap membantu menstabilkan kurikulum keagamaan di berbagai lembaga pendidikan. Dengan demikian, akar pertumbuhan lembaga pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya bersifat sosial dan keulamaan, tetapi juga bersifat material, yakni tersedianya medium teks yang memungkinkan ilmu ditransmisikan lebih luas dan lebih cepat (Cahyadi et al., 2025).

Akar keenam adalah tekanan kolonial yang secara tidak langsung justru memperkuat kebutuhan akan lembaga pendidikan Islam. Kolonialisme Belanda memang membawa struktur kekuasaan dan pendidikan baru, tetapi bagi masyarakat Muslim, kondisi itu juga mendorong penguatan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis komunitas sebagai ruang mempertahankan identitas, moralitas, dan otoritas keagamaan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa kolonialisme dan modernisme Islam memberi jalur perkembangan yang berbeda bagi pesantren di Indonesia; namun pada fase awalnya, tekanan kolonial justru mempertegas posisi pesantren dan institusi serupa sebagai benteng sosial-keagamaan. Karena itu, pertumbuhan lembaga pendidikan abad ke-19 tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonial: ia tumbuh sebagai hasil dari daya tahan masyarakat Muslim dalam mempertahankan tradisi ilmu di tengah perubahan politik yang besar (Fogg, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa akar pertumbuhan lembaga pendidikan di Indonesia abad ke-19 bersumber dari pertemuan beberapa unsur sekaligus: kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat, otoritas ulama, pola transmisi sanad, jaringan Haramain, dinamika pembaruan internal, budaya kitab, dan respons terhadap kolonialisme. Dalam perspektif sejarah intelektual Islam di Indonesia, lembaga pendidikan abad ke-19 bukan hanya sarana pengajaran agama, tetapi juga infrastruktur utama pembentukan ulama, reproduksi pengetahuan Islam, dan pembentukan masyarakat Muslim yang memiliki daya tahan sosial serta identitas intelektual yang khas. Dari basis inilah perkembangan pendidikan Islam Indonesia pada awal abad ke-20 kemudian memperoleh fondasi yang kokoh (Fogg, 2019).

Jaringan Haji, Haramain, dan Transmisi Ilmu Keislaman

Salah satu unsur paling penting dalam kondisi sosial-keagamaan abad ke-19 di Indonesia ialah menguatnya hubungan antara Muslim Nusantara dengan pusat-pusat ilmu Islam di Haramain, terutama Makkah dan Madinah. Pada masa ini, ibadah haji tidak lagi dipahami semata sebagai praktik ritual individual, melainkan juga sebagai jalur mobilitas intelektual dan pembentukan otoritas keagamaan. Perjalanan ke Haramain membuka akses bagi ulama dan pelajar Nusantara untuk belajar langsung kepada para syekh, memperoleh sanad, mempelajari kitab-kitab standar, serta membangun jejaring keilmuan yang kemudian dibawa pulang ke tanah air. Dalam kajian mutakhir, dinamika ini dipahami sebagai bagian dari Islam transregional, yakni keterhubungan yang aktif antara dunia Melayu-Indonesia dan pusat-pusat keilmuan Islam yang lebih luas (Azra, 2021).

Dalam konteks tersebut, komunitas ashāb al-jawiiyin atau komunitas Jawi di Haramain memegang peranan yang sangat penting. Mereka bukan hanya menjadi jamaah musiman, tetapi membentuk lingkungan belajar yang relatif menetap dan produktif. Francis R. Bradley menunjukkan bahwa jaringan pengetahuan antara Makkah dan Asia Tenggara pada abad ke-19 dibangun melalui manuskrip, hubungan keluarga ulama, dan sirkulasi ilmu yang intens. Penelitian yang lebih baru juga menegaskan bahwa transmisi sanad keilmuan para ulama Nusantara di Haramain menjadi penopang utama legitimasi ilmiah yang kemudian berpengaruh besar terhadap tradisi pesantren di Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia pada abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari keberadaan jaringan ulama Jawi di Haramain sebagai penghubung antara otoritas global Islam dan masyarakat lokal Nusantara (Bradley, 2014).

Dari jaringan itulah lahir figur-figur besar seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Muhammad arsyad al banjari, Syekh Mahfudz at-Tarmasi, dan KH.Ahmad Rifa'i. Mereka tidak hanya dikenal sebagai ulama Nusantara yang berhasil mencapai reputasi tinggi di Haramain, tetapi juga sebagai pengarang dan pengajar yang berpengaruh terhadap pembentukan corak keilmuan Islam di Indonesia. Kajian terbaru mengenai ulama Nusantara abad ke-19 menekankan bahwa masa penjajahan di tanah air justru beriringan dengan puncak prestasi intelektual ulama Nusantara di pusat-pusat ilmu Islam. Karya-karya mereka beredar di pesantren, menjadi rujukan dalam pengajaran fikih, tafsir, dan hadis, serta memberi kontribusi nyata terhadap pembentukan generasi ulama berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi ilmu pada abad ke-19 tidak sekadar memindahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk struktur otoritas keagamaan yang berjangka panjang di Indonesia (Ghozali, 2024).

Karena itu, jaringan haji dan Haramain sangat penting agar dapat memahami kondisi sosial-keagamaan abad ke-19 di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan intelektual Islam tidak lahir secara terisolasi di tingkat lokal, melainkan tumbuh dalam hubungan yang dinamis dengan jaringan global Islam. Dari Haramain, para ulama Nusantara membawa pulang kitab, metodologi belajar, jaringan sanad, dan orientasi pembaruan yang kemudian diterjemahkan ke dalam lembaga pendidikan, dakwah, dan kepemimpinan sosial keagamaan di berbagai daerah Indonesia (Azra, 2021).

Pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Kehidupan Sosial-Keagamaan Islam

Kondisi sosial-keagamaan umat Islam pada abad ke-19 juga dibentuk secara kuat oleh kehadiran kolonialisme Belanda. Ekspansi politik kolonial bukan hanya mengubah struktur kekuasaan lokal, tetapi juga memengaruhi cara Islam dipantau, dipetakan, dan dikelola oleh negara kolonial. Dalam kajian Jajat Burhanudin, pengetahuan tentang Islam yang dikembangkan Snouck Hurgronje tidak berhenti pada level akademik, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan kolonial untuk mengontrol kehidupan umat Islam di Hindia Belanda. Artinya, agama pada masa itu bukan sekadar wilayah spiritual, tetapi juga menjadi objek pemerintahan kolonial (Burhanudin, 2014).

Pengaruh kolonial terhadap kehidupan keagamaan tampak, antara lain, dalam upaya membedakan Islam sebagai ibadah pribadi dan Islam sebagai potensi politik. Pemerintah kolonial cenderung memberi ruang terbatas bagi praktik ibadah yang dianggap tidak mengganggu stabilitas, tetapi bersikap waspada terhadap jejaring ulama, haji, tarekat, dan lembaga pendidikan yang berpotensi membangun solidaritas sosial di luar kontrol negara. Dari sini terlihat bahwa kolonialisme ikut membentuk medan sosial keagamaan Islam: ia memaksa umat Islam untuk beradaptasi, sekaligus mempertegas pentingnya lembaga-lembaga keagamaan sebagai ruang pertahanan identitas dan otoritas masyarakat Muslim (Burhanudin, 2014).

Dampak kolonialisme juga terlihat jelas dalam bidang pendidikan. Kajian Saifudin Asrori dan Muhammad Ismail menegaskan bahwa kolonialisme Belanda melahirkan dualisme pendidikan, yaitu pemisahan antara pendidikan sekuler dan pendidikan agama. Dalam situasi tersebut, pesantren dan lembaga pendidikan Islam mempertahankan metode klasik, orientasi kitab, dan pembinaan moral-keagamaan, sementara sistem pendidikan kolonial mengembangkan pola yang berbeda. Dari perspektif sejarah intelektual, hal ini penting karena menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam abad ke-19 tumbuh bukan hanya sebagai institusi pembelajaran, tetapi juga sebagai bentuk respons sosial terhadap penetrasi sistem kolonial (Asrori & Ismail, 2023).

Maka, kolonialisme Belanda tidak dapat dipahami hanya sebagai latar politik, melainkan sebagai faktor aktif yang ikut membentuk pola keberagamaan, orientasi pendidikan, dan struktur otoritas Islam di Indonesia abad ke-19. Dalam tekanan kolonial, umat Islam justru memperkuat jaringan ulama, pesantren, dan komunitas religius sebagai sarana mempertahankan tradisi ilmu dan solidaritas sosial. Di titik inilah terlihat bahwa kondisi sosial-keagamaan abad ke-19 adalah hasil interaksi antara pertumbuhan internal Islam dan tekanan eksternal kolonialisme (Burhanudin, 2014).

Budaya Kitab, Manuskrip, dan Percetakan Islam pada Akhir Abad ke-19

Subtema lain yang sangat penting untuk melengkapi pembahasan ialah budaya kitab, manuskrip, dan percetakan Islam. Sebelum meluasnya teknologi cetak, transmisi ilmu keislaman di Nusantara sangat bergantung pada manuskrip, penyalinan teks, pembacaan lisan, dan pengajaran langsung dalam lingkaran ulama. Karena itu, tradisi intelektual Islam awal bertumpu pada kedekatan antara guru, teks, dan murid. Namun menjelang akhir abad ke-19, terjadi perubahan penting ketika budaya cetak mulai memperluas sirkulasi teks-teks keagamaan di dunia Melayu-Indonesia (Bradley, 2014).

Jajat Burhanudin menunjukkan bahwa pada abad ke-19 berkembang dua tradisi penulisan Islam yang sangat penting di Asia Tenggara, yaitu kitab Jawi dan kitab kuning. Da'ud al-Fatani menulis dalam bahasa Melayu, sedangkan Nawawi al-Bantani menulis dalam bahasa Arab; keduanya, menurut Burhanudin, berkontribusi pada pembentukan pengetahuan Islam masyarakat Muslim pada zamannya. Hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa gurunya, tetapi juga oleh bahasa ilmu, bentuk teks, dan medium penyebarannya. Dengan kata lain, sejarah intelektual Islam abad ke-19 juga merupakan sejarah tentang bagaimana teks keagamaan diproduksi, dipilih, dan diedarkan (Burhanudin, 2014).

Perkembangan teknologi litografi dan percetakan mempercepat produksi secara massif serta memperluas jejaring distribusi kitab-kitab karya ulama muslim. Mengutip Artikel Wei Jin Darryl Lim menelaah materialitas publikasi litograf Muslim-Melayu akhir abad ke-19 dan menempatkan Singapura sebagai salah satu lokasi penting dalam lanskap percetakan itu. Melalui medium cetak, teks-teks Islam tidak lagi terbatas pada salinan manuskrip yang langka, tetapi mulai menjangkau pembaca yang lebih luas. Perubahan ini berimplikasi langsung pada lembaga pendidikan Islam, karena kitab-kitab yang sebelumnya sulit diperoleh menjadi lebih mudah diakses, diajarkan, dan direproduksi (Lim, 2024).

Budaya kitab, manuskrip, dan percetakan Islam pada akhir abad ke-19 harus dilihat sebagai fondasi material dari pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia. Jika jaringan Haramain menyediakan otoritas dan sanad, maka budaya teks menyediakan sarana bagi penyebaran ilmu itu sendiri. Dari sinilah dapat dipahami bahwa kondisi sosial-keagamaan abad ke-19 tidak hanya dibentuk oleh tokoh dan institusi, tetapi juga oleh peredaran teks yang menghubungkan ulama, pelajar, lembaga pendidikan, dan masyarakat Muslim dalam ruang yang semakin luas (Burhanudin, 2022).

Historiografi Islam Indonesia

Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama muslim pada abad ke-19 tidak saja membahas ilmu fikih, tauhid, akhlak, atau tasawuf. Tetapi spektrumnya lebih luas meliputi sejarah (tarikh), silsilah, hingga kronik sosial-politik dan menjadi alat perlawanan intelektual terhadap colonialism. Berbeda dengan historiografi modern yang menekankan objektivitas ilmiah dan narasi linear, kitab kuning sejarah menggabungkan metode sanad (rantai perawi), keterangan ulama terdahulu, dan pengamatan langsung penulis seperti beberapa kitab babad lokal, hikayat, dan bahkan nadzhoman (puisi naratif). Contohnya, Babad Diponegoro yang ditulis sendiri oleh sang pangeran dalam bahasa Jawa Pegon, memiliki fungsi ganda: sebagai catatan sejarah dan sebagai manifestasi identitas kultural Islam-Jawa. Kitab ini dikaji di Leiden dan telah masuk memory of the world oleh UNESCO.

Syekh Nawawi al-Bantani, dalam Tafsir Munir dan risalah kecil seperti Tanqih al-Qaul, menyisipkan narasi sejarah mengenai keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia dan peringatan agar Nusantara tidak mengulang nasib serupa. Dalam konteks kolonialisme, ia menulis bahwa agama dan sejarah adalah dua sisi mata uang umat yang harus dijaga. Kitab lain yang patut dicatat adalah Silsilah al Ulama fi Jawi, disusun oleh Syekh Muhammad Thahir dari Palembang, yang tidak hanya memuat data genealogi ulama tetapi juga dinamika politik lokal, asal-muasal pesantren, serta relasi pesantren dengan kerajaan Islam seperti Palembang Darussalam, Banten, dan Mataram. Demikian pula Syekh Yusuf al-Maqassari dalam Safinat

an-Najah, menguraikan jatuhnya Makassar akibat tipu daya kolonial Belanda. Ia mencatat persekutuan dan pengkhianatan kerajaan-kerajaan lokal yang berpihak pada VOC. Syekh Yusuf menampilkan pendekatan sejarah profetik yakni menghubungkan musibah kolonialisme dengan melemahnya iman dan solidaritas umat Islam.

Kitab kuning sejarah karya ulama abad ke-19 memiliki peran besar dalam merekonstruksi memori kolektif di tengah penulisan sejarah Indonesia yang didominasi sudut pandang kolonial, sejarah lokal yang dihapus dari kurikulum resmi oleh pemerintah kolonial, para ulama menulis sendiri sejarah mereka. Ini menjadi bentuk perlawanan intelektual dan spiritual yang tidak hanya mencatat peristiwa, tapi juga menafsirkan zaman, menjelaskan sebab-akibat moral, dan menggelorakan patriotisme.

PENUTUP

Kondisi sosial-keagamaan Indonesia pada abad ke-19 merupakan fase penting dalam pembentukan fondasi intelektual Islam di Nusantara. Pada masa ini, Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran keagamaan dalam pengertian ritual, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan sosial yang membentuk identitas kolektif, moralitas masyarakat, serta struktur otoritas keilmuan. Di tengah perubahan sosial dan tekanan kolonial, masyarakat Muslim Indonesia justru menunjukkan kemampuan adaptasi dan konsolidasi yang kuat melalui penguatan lembaga pendidikan, jaringan ulama, dan tradisi keilmuan berbasis kitab. Fase pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia pada abad ke-19 ditandai oleh semakin intensifnya hubungan antara dunia Islam Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan di Haramain. Jaringan haji, mobilitas pelajar, dan hubungan sanad keilmuan telah membuka ruang bagi masuknya gagasan, kitab, serta metodologi pembelajaran yang kemudian memperkaya tradisi intelektual Islam lokal. Dari proses ini lahir ulama-ulama besar Nusantara yang tidak hanya memiliki pengaruh di Timur Tengah, tetapi juga memberi kontribusi besar terhadap pembentukan corak keilmuan Islam di Indonesia.

Di sisi lain, akar pertumbuhan lembaga pendidikan Islam pada abad ke-19 bertumpu pada kebutuhan masyarakat Muslim untuk mentransmisikan ajaran agama secara berkelanjutan. Pesantren, surau, dan dayah tumbuh sebagai institusi sosial-keagamaan yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembinaan moral, penguatan identitas, dan reproduksi otoritas ulama. Lembaga-lembaga ini menjadi infrastruktur utama bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, karena di dalamnya berlangsung proses pengajaran, internalisasi nilai, dan pelestarian tradisi intelektual secara turun-temurun. Kondisi tersebut semakin diperkaya oleh keberadaan budaya kitab, manuskrip, dan perkembangan percetakan Islam pada akhir abad ke-19. Peredaran teks keagamaan yang semakin luas memungkinkan penyebaran ilmu berlangsung lebih cepat dan lebih sistematis. Pada saat yang sama, tekanan kolonial Belanda justru mempertegas pentingnya lembaga pendidikan Islam dan jaringan ulama sebagai benteng sosial-keagamaan masyarakat Muslim. Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya menjadi latar politik, tetapi juga faktor yang ikut membentuk strategi adaptasi dan penguatan tradisi keilmuan Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, abad ke-19 dapat dipahami sebagai periode konsolidasi penting dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia. Periode ini meletakkan dasar bagi

perkembangan Islam Indonesia pada masa selanjutnya, termasuk lahirnya pembaruan pemikiran, penguatan organisasi keagamaan, dan transformasi pendidikan Islam pada awal abad ke-20. Dengan memahami kondisi sosial-keagamaan abad ke-19, kita dapat melihat bahwa sejarah intelektual Islam di Indonesia tidak terbentuk secara tunggal, melainkan melalui pertemuan antara tradisi lokal, jaringan global Islam, dinamika lembaga pendidikan, dan tantangan kolonial yang saling berinteraksi secara kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Adona, P., Deski, A., Alfaruqi, D., & Iswantir, M. (2025). The transformation of surau from traditional education centres to modern spiritual development institutions in Minangkabau. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 286–293. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i2.1137>
- Alifa, H. L., Sodiqin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Interreligious Marriages in Indonesia: From Legal Disharmony to Legal Conflict. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/5922>
- Asrori, S., & Ismail, M. (2023). Colonialism and Islamic modernism: Differences in the development paths of Islamic boarding schools in Indonesia. *Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 227–257. <https://doi.org/10.15408/iu.v10i2.39189>
- Azra, A. (2021). Transregional Islam in the Malay-Indonesian world: Legacies and new dynamics. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(2), 163–166. <https://doi.org/10.1017/trn.2021.20>
- Bradley, F. R. (2014). Islamic reform, the family, and knowledge networks linking Mecca to Southeast Asia in the nineteenth century. *The Journal of Asian Studies*, 73(1), 89–111. <https://doi.org/10.1017/S0021911813001691>
- Burhanudin, J. (2014). The Dutch colonial policy on Islam: Reading the intellectual journey of Snouck Hurgronje. *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 25–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521>
- Burhanudin, J. (2022). Two Islamic writing traditions in Southeast Asia: Kitab Jawi and kitab kuning with reference to the works of Da'ud al-Fatani dan Nawawi al-Bantani. *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601>
- Cahyadi, I., Yunani, A., Dachlan, M., & Suhendra, A. (2025). The sociology of knowledge in pesantren: Sanad, sorogan-bandongan, and the making of intellectual authority. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(2), 439–462. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v25i2.10952>
- Darmawan, D., Solahudin, M., Alamin, N., & Iqbal, M. (2025). THE EFFECT OF PRINT LITERACY ON THE TRADITION OF WRITING QUR'ANIC EXEGESIS IN WEST JAVA IN THE EARLY 20TH CENTURY. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(2), 466–498.
- Fogg, K. W. (2019). *Indonesia's Islamic revolution*. Cambridge University Press.
- Ghozali, A. M. (2024). A Portrait of the Nineteenth-Century Nusantara Ulema Network in Haramain (Transmission of Shaykh Mahfudz At-Tarmasi's Tafsir-Hadith in Kifāyat Al-Mustafid). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 18(2), 189–212.
- Lim, W. J. D. (2024). Sites of significance: Reading the print materiality of late 19th-century Muslim-Malay lithographed publications. *Indonesia and the Malay World*, 52(152), 97–126. <https://doi.org/10.1080/13639811.2024.2326385>
- Taufiq, A., & Suryo, D. (2024). Educational development of Indonesian pesantren in the perspective of Anthony Giddens' duality social change. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 5(4), 765–784. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i4.2365>